



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Telpn (0532) 28064 / Fax (0532) 23057  
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112  
Website : [simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id) Email : [dpmptspkobar@gmail.com](mailto:dpmptspkobar@gmail.com)

Pangkalanbun, 21 Agustus 2024

Kepada  
Yth : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang)  
Kab. Kotawaringin Barat  
Up. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah  
di -  
PANGKALAN BUN

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 066 / *27* /DPM-PTSP/2024

| No. | Jenis Surat Yang Dikirim   | Banyaknya        | Keterangan   |
|-----|--|------------------|--|
| 1   | 2  | 3                | 4  |
| 1   | Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTPS) Kabupaten Kotawaringin Barat | 1 (satu) Dokumen | Disampaikan dengan hormat untuk Memenuhi Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan No.000.7.2.4/57.4/BAPP-II tanggal 15 Agustus 2024 |

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kotawaringin Barat



Ir. KAMALUDIN, M.Si  
NIP.1965 0105 199403 1 010





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

**RENCANA KERJA  
PERUBAHAN  
(RENJA PERUBAHAN)  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Telp (0532) 28064 Fax (0532) 23057  
Web : [simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://simdpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id)  
Email : [dpmtspkobar@gmail.com](mailto:dpmtspkobar@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

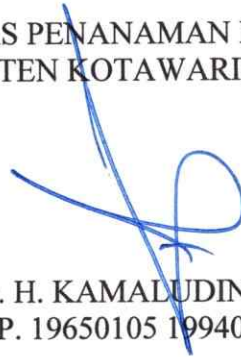
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja ini sebagai tindak lanjut berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Barat No : 000.7.2.4/474/Bapp-II tentang Penyesuaian Rancangan Akhir Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024. Dalam dokumen ini dijabarkan berbagai rencana program/kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalan Bun, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si  
NIP. 19650105 199403 1 010

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DPMPTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

**DAFTAR ISI**

|  |    |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1  |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 1  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 3  |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....   | 3  |
| BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SD TW II TA 2024 .....                | 4  |
| 2.1. Evaluasi Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....            | 4  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                       | 14 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... | 15 |
| 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                 | 15 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....                   | 16 |
| 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional .....                                | 16 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP .....         | 18 |
| 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                | 19 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 23 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan. Perubahan renja dapat dilaksanakan setelah penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja 2024 ini memuat program/kegiatan/sub kegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah pedoman terhadap semua program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini serta adanya perubahan asumsi tahun berjalan, sehingga nantinya rencana kerja yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Perubahan Renja ini mengacu pada kondisi eksisting serta evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi perubahan renja disesuaikan dengan renstra.
2. Program/ kegiatan/ sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program/ kegiatan/subkegiatan yang direncanakan memuat target capaian indikator, kinerja outcome program, target dan indikator kinerja kegiatan/subkegiatan, dana yang diperlukan kegiatan.
4. Perubahan renja ini merupakan dokumen yang akan dilaksanakan dalam tahun berkenaan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan perubahan renja tahun 2023 didasarkan pada :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DPMPSTP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- k. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
- t. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38 tahun 2015 tentang Perizinan Penanaman Modal;
- u. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- v. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2024 disusun dengan dimaksudkan :

1. Mengakomodasi perubahan kondisi pada tahun 2024 yang berkaitan dengan Program / Kegiatan Sub Kegiatan;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2024 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2024;
2. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan;

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan rencana kerja tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan

#### **BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SD TRIWULAN II TA. 2024**

- 2.1 Evaluasi Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### **BAB IV Penutup**

**BAB II**

**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SD TRIWULAN II TA. 2024**

Evaluasi Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik makro dan mikro maupun kebijakan dan pelaksanaan, menyelaraskan program dan perencanaan serta tercapainya efektifitas perencanaan.

**2.1 Evaluasi Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, pada tahun 2024 melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, dengan Anggaran Murni sebesar Rp. 10.580.224.400,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.629.581.811,00 atau 34,31 % sedangkan Perubahan melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp 11.122.551.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp 4.254.581.625,00 atau 40,21 %. Hal ini belum sesuai dengan rata-rata capaian triwulanan, disebabkan terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi keuangannya karena rencana penyelesaian kegiatan direncanakan pada triwulan III dan IV.

Tabel II.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2024  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kotawaringin Barat SD Tanggal 31 Juli 2024

| NO. | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                               | PAGU ANGGARAN    |                    | REALISASI        | CAPAIAN  |       |
|-----|--|------------------|--------------------|------------------|----------|-------|
|     |  | Anggaran Murni   | Anggaran Perubahan |                  | Keuangan | Fisik |
| A   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA     | 9.414.774.050,00 | 9.913.263.802,00   | 3.874.022.256,00 | 41,15    | 45,15 |
| I   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 63.025.398,00    | 59.637.398,00      | 18.115.846,00    | 28,74    | 29,54 |
| 1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 12.761.898,00    | 10.561.898,00      | -                | -        | -     |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 5.072.400,00     | 3.872.400,00       | -                | -        | -     |



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DPMPTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|            |   |                         |                         |                         |              |              |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 3.864.050,00            | 3.864.050,00            | -                       | -            | -            |
| 4          | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 2.499.850,00            | 2.499.850,00            | 2.499.850,00            | 100,00       | 100,00       |
| 5          | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 1.799.800,00            | 1.799.800,00            | -                       | -            | -            |
| 6          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 35.023.350,00           | 35.035.350,00           | 15.615.996,00           | 44,59        | 44,59        |
| 7          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.004.050,00            | 2.004.050,00            | -                       | -            | 25,00        |
| <b>II</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>5.060.551.528,00</b> | <b>4.872.665.650,00</b> | <b>3.085.659.729,00</b> | <b>60,97</b> | <b>65,43</b> |
| 8          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 5.001.101.028,00        | 4.831.187.000,00        | 3.054.635.909,00        | 61,08        | 65,36        |
| 9          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP                       | 16.899.850,00           | 7.000.000,00            | 2.000.000,00            | 11,83        | 11,83        |
| 10         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 40.431.000,00           | 32.359.000,00           | 29.023.820,00           | 71,79        | 100,00       |
| 11         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 2.119.650,00            | 2.119.650,00            | -                       | -            | -            |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>1.696.150,00</b>     | <b>696.150,00</b>       | -                       | -            | -            |
| 12         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 696.150,00              | 696.150,00              | -                       | -            | -            |
| 13         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.000.000,00            | -                       | -                       | -            | -            |
| <b>IV</b>  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>133.164.000,00</b>   | <b>170.480.000,00</b>   | <b>28.901.980,00</b>    | <b>21,70</b> | <b>39,73</b> |
| 14         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 21.900.000,00           | 21.900.000,00           | -                       | -            | -            |
| 15         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 111.264.000,00          | 160.972.000,00          | 28.901.980,00           | 25,98        | 47,55        |
| <b>V</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>344.759.251,00</b>   | <b>366.931.440,00</b>   | <b>210.190.249,00</b>   | <b>51,34</b> | <b>52,97</b> |
| 16         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 9.618.150,00            | 9.618.150,00            | 4.740.255,00            | 49,28        | 49,28        |
| 17         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 83.462.680,00           | 77.641.840,00           | 73.360.100,00           | 87,90        | 90,21        |
| 18         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.176.700,00            | 6.176.700,00            | -                       | -            | 59,31        |
| 19         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 55.568.971,00           | 19.484.413,00           | 2.312.500,00            | 4,16         | 4,16         |
| 20         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 188.933.000,00          | 245.247.000,00          | 129.777.394,00          | 68,69        | 68,69        |
| 21         | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD   | 999.750,00              | 999.750,00              | -                       | -            | -            |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DPMPTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|             |  |                         |                         |                       |              |              |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>VI</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>324.332.232,00</b>   | <b>1.062.695.624,00</b> | <b>58.050.000,00</b>  | <b>17,90</b> | <b>21,31</b> |
| 22          | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                         | 406.800.000,00          |                       |              |              |
| 23          | Pengadaan Mebel  | 104.861.922,00          | 161.985.297,00          |                       |              |              |
| 24          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 207.199.260,00          | 486.476.004,00          | 58.050.000,00         | 28,02        | 28,32        |
| 25          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 12.271.050,00           | 10.439.550,00           |                       |              | 85,07        |
| <b>VII</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>405.932.016,00</b>   | <b>291.395.347,00</b>   | <b>135.119.692,00</b> | <b>27,92</b> | <b>58,13</b> |
| 26          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 500.000,00              |                         |                       | -            | -            |
| 27          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 229.464.016,00          | 115.367.347,00          | 56.617.621,00         | 24,67        | 70,51        |
| 28          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 175.968.000,00          | 176.061.900,00          | 78.502.071,00         | 44,61        | 44,61        |
| <b>VIII</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>3.081.313.475,00</b> | <b>3.088.762.193,00</b> | <b>337.984.760,00</b> | <b>10,82</b> | <b>10,82</b> |
| 29          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                         | 4.655.000,00            |                       |              |              |
| 30          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 43.173.508,00           | 46.727.616,00           | 18.920.695,00         | 43,82        | 43,83        |
| 31          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 38.110.000,00           | 38.110.000,00           | 15.260.000,00         | 40,04        | 40,04        |
| 32          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya   | 3.000.029.967,00        | 3.000.029.967,00        | 303.804.065,00        | 10,13        | 11,89        |
|             |  |                         |                         |                       |              |              |
| <b>B</b>    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | <b>156.833.700,00</b>   | <b>205.908.550,00</b>   | <b>52.434.395,00</b>  | <b>33,43</b> | <b>33,43</b> |
| <b>IX</b>   | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>116.833.800,00</b>   | <b>176.039.791,00</b>   | <b>35.764.395,00</b>  | <b>30,61</b> | <b>30,61</b> |
| 33          | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                       | 116.833.800,00          | 176.039.791,00          | 35.764.395,00         | 30,61        | 30,61        |
| <b>X</b>    | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | <b>39.999.900,00</b>    | <b>29.862.000,00</b>    | <b>16.670.000,00</b>  | <b>41,68</b> | <b>41,68</b> |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DPMPSTP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|      |  |                       |                       |                       |              |              |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 34   | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | 39.999.900,00         | 29.862.000,00         | 16.670.000,00         | 41,68        | 41,68        |
|      |  |                       |                       |                       |              |              |
| C    | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>235.119.750,00</b> | <b>222.039.352,00</b> | <b>95.067.534,00</b>  | <b>40,43</b> | <b>40,43</b> |
| XI   | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>235.119.750,00</b> | <b>222.039.352,00</b> | <b>95.067.534,00</b>  | <b>40,43</b> | <b>40,43</b> |
| 35   | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | 235.119.750,00        | 222.039.352,00        | 95.067.534,00         | 40,43        | 40,43        |
|      |  |                       |                       |                       |              |              |
| D    | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>133.731.000,00</b> | <b>128.493.000,00</b> | <b>39.750.778,00</b>  | <b>27,61</b> | <b>30,53</b> |
| XII  | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>133.731.000,00</b> | <b>128.493.000,00</b> | <b>39.750.778,00</b>  | <b>29,72</b> | <b>30,63</b> |
| 36   | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | 51.470.800,00         | 50.632.800,00         | 16.908.778,00         | 32,85        | 32,85        |
| 37   | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko   | 8.389.500,00          | 8.389.500,00          |                       |              |              |
| 38   | Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | 73.870.700,00         | 69.470.700,00         | 22.842.000,00         | 30,92        | 32,56        |
|      |  |                       |                       |                       |              |              |
| E    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>595.257.000,00</b> | <b>595.257.000,00</b> | <b>172.260.170,00</b> | <b>20,38</b> | <b>27,10</b> |
| XIII | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>595.257.000,00</b> | <b>595.257.000,00</b> | <b>172.260.170,00</b> | <b>28,94</b> | <b>36,29</b> |
| 39   | Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | 89.288.000,00         | 89.288.000,00         | 26.750.000,00         | 29,96        | 31,92        |
| 40   | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha   | 327.393.000,00        | 327.393.000,00        | 87.826.170,00         | 26,83        | 34,88        |
| 41   | Pengawasan Penanaman Modal   | 178.576.000,00        | 178.576.000,00        | 57.684.000,00         | 32,30        | 41,07        |
|      |  |                       |                       |                       |              |              |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
 DPMPSTP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|     |  |                          |                          |                         |              |              |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| F   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>44.508.900,00</b>     | <b>44.508.900,00</b>     | <b>21.046.492,00</b>    | <b>47,29</b> | <b>50,79</b> |
| XIV | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>44.508.900,00</b>     | <b>44.508.900,00</b>     | <b>21.046.492,00</b>    | <b>47,29</b> | <b>50,79</b> |
| 42  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 44.508.900,00            | 44.508.900,00            | 21.046.492,00           | 47,29        | 50,79        |
|     | <b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>   | <b>10.580.224.400,00</b> | <b>11.122.551.000,00</b> | <b>4.254.581.625,00</b> | <b>40,21</b> | <b>44,17</b> |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Capaian Kinerja Realisasi Anggaran masing-masing program sampai dengan 31 Juli 2024 anggaran sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi keuangan sebesar 41,15 % dan realisasi fisik sebesar 41,15 %;
2. Capaian Kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, realisasi keuangan sebesar 33,43 % dan realisasi fisik sebesar 33,43 %;
3. Capaian Kinerja Program Promosi Penanaman Modal, realisasi keuangan sebesar 40,43 % dan realisasi fisik sebesar 40,43 %;
4. Capaian Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal , realisasi keuangan sebesar 27,61 % dan realisasi fisik sebesar 30,53 %;
5. Capaian Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, realisasi keuangan sebesar 20,38 % dan realisasi fisik sebesar 27,10 %;
6. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, realisasi keuangan sebesar 47,29 % dan realisasi fisik sebesar 50,79 %;

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
 DPMTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

Tabel II.2  
 Perubahan Program, Kegiatan Dan Target Kinerja  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024

| No. | Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Kinerja    |                   | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
|-----|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|     |   |   |  | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |                   |                 |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8               |
| A   | 2.18.01   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                   | <b>Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah</b>   | 100%              | 100%              |                   |                 |
| I   | 2.18.01.2.01                                      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | 13 Dok            | 6 Dok             |                   |                 |
| 1   | 2.18.01.2.01.0001                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dok             | 2 Dok             | 1 Dok             |                 |
| 2   | 2.18.01.2.01.0002                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD   | 1 Dok             | 1 Dok             | 1 Dok             |                 |
| 3   | 2.18.01.2.01.0003                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD   | 1 Dok             | 1 Dok             |                   |                 |
| 4   | 2.18.01.2.01.0004                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD   | 1 Dok             | 1 Dok             | 1 Dok             |                 |
| 5   | 2.18.01.2.01.0005                                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD   | 1 Dok             | 1 Dok             |                   |                 |
| 6   | 2.18.01.2.01.0006                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Lap            | 12 Lap            | 7 Lap             |                 |
| 7   | 2.18.01.2.01.0007                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 8 Lap             | 4 Lap             | 2 Lap             |                 |
| II  | 2.18.01.2.02                                      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | 3500 Dok          | 945 Dok           |                   |                 |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DPMPSTP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|            |                     |   |  |                |              |            |  |
|------------|---------------------|---|--|----------------|--------------|------------|--|
| 8          | 2.18.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 33 Org/Bln     | 33 Org/Bln   | 33 Org/Bln |  |
| 9          | 2.18.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1500 Dok       | 943 Dok      | 210 Dok    |  |
| 10         | 2.18.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                       | 1 Lap          | 1 Lap        | 1 Lap      |  |
| 11         | 2.18.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 13 Lap         | 13 Lap       |            |  |
| <b>III</b> | <b>2.18.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                     | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>   | <b>4 5 Dok</b> | <b>2 Dok</b> |            |  |
| 12         | 2.18.01.2.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dok          | 2 Dok        |            |  |
| 13         | 2.18.01.2.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Lap          | -            |            |  |
| <b>IV</b>  | <b>2.18.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>1 Dok</b>   | <b>1 Dok</b> |            |  |
| 14         | 2.18.01.2.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 36 Paket       | 36 Paket     |            |  |
| 15         | 2.18.01.2.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 10 Orang       | 18 orang     | 2 orang    |  |
| <b>V</b>   | <b>2.18.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>1 Dok</b>   | <b>1 Dok</b> |            |  |
| 16         | 2.18.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 1 Paket      |            |  |
| 17         | 2.18.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 1 Paket      | 1 Paket    |  |
| 18         | 2.18.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 1 Paket      |            |  |
| 19         | 2.18.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 5 Paket        | 3 Paket      |            |  |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DPMPTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|             |                     |   |  |              |              |         |  |
|-------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|---------|--|
| 20          | 2.18.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 25 Lap       | 48 Lap       | 8 Lap   |  |
| 21          | 2.18.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 4 Dok        | 1 Dok        |         |  |
| <b>VI</b>   | <b>2.18.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               | <b>2 Dok</b> | <b>2 Dok</b> |         |  |
| 22          | 2.18.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | -            | 1 Unit       |         |  |
| 23          | 2.18.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 48 Unit      | 101 Unit     |         |  |
| 24          | 2.18.01.2.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 24 Unit      | 36 Unit      |         |  |
| 25          | 2.18.01.2.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 8 Unit       | 7 Unit       | 7 Unit  |  |
| <b>VII</b>  | <b>2.18.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | <b>1 Dok</b> | <b>1 Dok</b> |         |  |
| 26          | 2.18.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Lap       | -            |         |  |
| 27          | 2.18.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan                | 12 Lap       | 12 Lap       | 6 Lap   |  |
| 28          | 2.18.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Lap       | 12 Lap       | 6 Lap   |  |
| <b>VIII</b> | <b>2.18.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>1 Dok</b> | <b>1 Dok</b> |         |  |
| 29          | 2.18.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | -            | 1 Unit       |         |  |
| 30          | 2.18.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit       | 7 Unit       | 1 Unit  |  |
| 31          | 2.18.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 46 Unit      | 46 Unit      | 24 Unit |  |
| 32          | 2.18.01.2.09.0009   | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi                                | 1 Unit       | 1 Unit       |         |  |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DPMPSTP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|     |                   |  |   |                    |                    |                    |  |
|-----|-------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| B   | 2.18.02           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Capaian Rancangan Produk Hukum dan Data Potensi Investasi</b>   | 90%                | 90%                |                    |  |
| IX  | 2.18.02.2.01      | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum</b>  | 2 Dok              | 2 Dok              |                    |  |
| 33  | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | 2 Dok              | 2 Dok              | 1 Dok              |  |
| X   | 2.18.02.2.02      | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | <b>Tesedianya Data Peta Investasi</b>   | 1 Dok              | 1 Dok              |                    |  |
| 34  | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota   | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | 1 Dok              | 1 Dok              |                    |  |
| C   | 2.18.03           | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan</b>   | 92 %               | 92 %               |                    |  |
| XI  | 2.18.03.2.01      | <b>Penyeenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan</b>   | 6 Media Promosi    | 2 Media Promosi    |                    |  |
| 35  | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota   | 1 Dok              | 1 Dok              |                    |  |
| D   | 2.18.04           | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Perizinan yang Diterbitkan</b>  | 98%                | 98%                |                    |  |
| XII | 2.18.04.2.01      | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Layanan</b>   | 1700 Pelaku Usaha  | 1500 Pelaku Usaha  |                    |  |
| 36  | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 500 Pelaku Usaha   | 500 Pelaku Usaha   | 125 Pelaku Usaha   |  |
| 37  | 2.18.04.2.01.0007 | Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten / Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 500 Kegiatan Usaha | 500 Kegiatan Usaha | 125 Kegiatan Usaha |  |



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DPMPTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|      |                   |  |   |                   |                   |                   |  |
|------|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 38   | 2.18.04.2.01.0008 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko   | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 500 Pelaku Usaha  | 500 Pelaku Usaha  | 125 Pelaku Usaha  |  |
| E    | 2.18.05           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu</b>   | 76%               | 76%               |                   |  |
| XIII | 2.18.05.2.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | 315 Perusahaan    | 315 Perusahaan    |                   |  |
| 39   | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   | 25 Kegiatan Usaha | 10 Kegiatan Usaha | 3 Kegiatan Usaha  |  |
| 40   | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | 230 Pelaku Usaha  | 230 Pelaku Usaha  | 57 Pelaku Usaha   |  |
| 41   | 2.18.05.2.01.0006 | Pegawasan Penanaman Modal  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 75 Kegiatan Usaha | 75 Kegiatan Usaha | 18 Kegiatan Usaha |  |
| F    | 2.18.06           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Data yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola</b>  | 95%               | 95%               |                   |  |
| XIV  | 2.18.06.2.01      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi   | 4 Dok             | 4 Dok             |                   |  |
| 42   | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  | 4 Dok             | 4 Dok             | 1 Dok             |  |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi : membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksana urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun pencapaian kinerja maupun hal-hal yang menjadi kekuatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
2. Adanya standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian dan transparan;
3. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
4. Pemanfaatan MPP (Mal Pelayanan Publik) sebagai wadah teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Beberapa permasalahan pada DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut, diantaranya :

- 1) Belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan dan perkantoran di MPP;
- 2) Terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia;
- 3) Terbatasnya tenaga teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang pelayanan perizinan dan non Perizinan
- 5) Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan Online Single Submission (OSS)
- 6) Masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh;

7) Belum optimalnya pelaksanaan Promosi penanaman modal;

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan.

Pelayanan Perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Dalam hal pelayanan perizinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana sangat menentukan dalam rangka pencapaian pelayanan perizinan yang efektif. Pelayanan perizinan dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses pelayanan dapat berperan dengan baik. Kesatupaduan unsur – unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan. Oleh karena itu, untuk lebih terarah dan sistematisnya pembahasan masalah tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan perizinan. Ada beberapa isu - isu penting Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya antara lain :

1. Penerapan sistem OSS ( Online Single Submission) oleh pemerintah pusat yang belum berjalan secara maksimal.
2. Pemahaman masyarakat tentang layanan DPMPTSP masih rendah;
3. Belum terlaksananya secara maksimal sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses pelayanan penanaman modal dan Perizinan;
4. Penempatan Tim Teknis dari Dinas terkait perizinan masih belum seluruhnya ditempatkan di DPMPTSP yang mengakibatkan lamanya proses perizinan.

### 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak ada usulan dari Pelayanan Provinsi, LSM dan Asosiasi-Asosiasi dan Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Provinsi serta usulan Musrenbang kabupaten/kota.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan perubahan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran renja, visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD. Dalam Perubahan Renja Tahun 2024 terdapat 6 Program, 14 Kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian Program / kegiatan, maka dirumuskan indikator kinerja. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan sumber dana lainnya yang sah.

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakanyang diperintahkan oleh Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu satu pintu dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian ini berbeda dengan pengertian ”pelayanan terpadu satu atap”. Dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian ”pelayanan terpadu satu atap”

adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat "payung" bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan " payung" tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.

3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat yaitu MPP (Mal Pelayanan Publik)
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Aturan baru ini tentu saja membawa dampak perubahan bagi DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga perlu melakukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Terutama dari sisi aparaturnya, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan OSS, karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara OSS di daerah. Dengan mengikuti berbagai pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pendampingan OSS dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SiCantik. SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyerdehanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri adalah aplikasi berbasis web yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan Target Sasaran Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2

Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024

| NO | TUJUAN                                   | SASARAN                                   | INDIKATOR KINERJA         | TARGET KINERJA |
|----|--|---|---------------------------|----------------|
| 1. | Mengoptimalkan realisasi penanaman modal | Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN | Realisasi penanaman modal | 85             |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DPMPTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|    |  |   |  |             |
|----|--|---|--|-------------|
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan | 6.8 Triliun |
|----|--|---|--|-------------|

**3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan beberapa program dan kegiatan Perubahan pada Tahun Anggaran 2024. Adapun Program dan Kegiatan Perubahan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel III.3  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan TA. 2024  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

| No.       | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | PAGU ANGGARAN           |                         | Bertambah/ Berkurang    | Sumber Dana | Ket |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|
|           |  | Anggaran Murni          | Anggaran Perubahan      |                         |             |     |
| 1         | 2  | 3                       | 4                       | 5                       | 6           | 7   |
| <b>A</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                  | <b>9.414.774.050,00</b> | <b>9.913.263.802,00</b> | <b>498.489.752,00</b>   | <b>APBD</b> |     |
| <b>I</b>  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>              | <b>63.025.398,00</b>    | <b>59.637.398,00</b>    | <b>(3.388.000,00)</b>   | <b>APBD</b> |     |
| 1         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 12.761.898,00           | 10.561.898,00           | (2.200.000,00)          | APBD        |     |
| 2         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 5.072.400,00            | 3.872.400,00            | (1.200.000,00)          | APBD        |     |
| 3         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                 | 3.864.050,00            | 3.864.050,00            | -                       | APBD        |     |
| 4         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 2.499.850,00            | 2.499.850,00            | -                       | APBD        |     |
| 5         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD   | 1.799.800,00            | 1.799.800,00            | -                       | APBD        |     |
| 6         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP | 35.023.350,00           | 35.035.350,00           | 12.000,00               | APBD        |     |
| 7         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 2.004.050,00            | 2.004.050,00            | -                       | APBD        |     |
| <b>II</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>5.060.551.528,00</b> | <b>4.872.665.650,00</b> | <b>(187.885.878,00)</b> | <b>APBD</b> |     |
| 8         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 5.001.101.028,00        | 4.831.187.000,00        | (169.914.028,00)        | APBD        |     |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DPMPTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|            |   |                       |                         |                         |             |  |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 9          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP               | 16.899.850,00         | 7.000.000,00            | (9.899.850,00)          | APBD        |  |
| 10         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 40.431.000,00         | 32.359.000,00           | (8.072.000,00)          | APBD        |  |
| 11         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.119.650,00          | 2.119.650,00            | -                       | APBD        |  |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>1.696.150,00</b>   | <b>696.150,00</b>       | <b>(1.000.000,00)</b>   | <b>APBD</b> |  |
| 12         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | 696.150,00            | 696.150,00              | -                       | APBD        |  |
| 13         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1.000.000,00          |                         | (1.000.000,00)          | APBD        |  |
| <b>IV</b>  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>133.164.000,00</b> | <b>170.480.000,00</b>   | <b>37.316.000,00</b>    | <b>APBD</b> |  |
| 14         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | 21.900.000,00         | 21.900.000,00           | -                       | APBD        |  |
| 15         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | 111.264.000,00        | 160.972.000,00          | 49.708.000,00           | APBD        |  |
| <b>V</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>344.759.251,00</b> | <b>366.931.440,00</b>   | <b>22.172.189,00</b>    | <b>APBD</b> |  |
| 16         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 9.618.150,00          | 9.618.150,00            | -                       | APBD        |  |
| 17         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 83.462.680,00         | 77.641.840,00           | (5.820.840,00)          | APBD        |  |
| 18         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.176.700,00          | 6.176.700,00            | -                       | APBD        |  |
| 19         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | 55.568.971,00         | 19.484.413,00           | (36.084.558,00)         | APBD        |  |
| 20         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 188.933.000,00        | 245.247.000,00          | 56.314.000,00           | APBD        |  |
| 21         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 999.750,00            | 999.750,00              | -                       | APBD        |  |
| <b>VI</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>324.332.232,00</b> | <b>1.062.695.624,00</b> | <b>738.363.392,00</b>   | <b>APBD</b> |  |
| 22         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             |                       | 406.800.000,00          | 406.800.000,00          | APBD        |  |
| 23         | Pengadaan Mebel   | 104.861.922,00        | 166.644.522,00          | 61.782.600,00           | APBD        |  |
| 24         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 207.199.260,00        | 486.476.004,00          | 279.276.744,00          | APBD        |  |
| 25         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 12.271.050,00         | 10.439.550,00           | (1.831.500,00)          | APBD        |  |
| <b>VII</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>405.932.016,00</b> | <b>291.395.347,00</b>   | <b>(114.536.669,00)</b> | <b>APBD</b> |  |
| 26         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 500.000,00            |                         | (500.000,00)            | APBD        |  |
| 27         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | 229.464.016,00        | 115.367.347,00          | (114.096.669,00)        | APBD        |  |



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DPMTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|             |  |                         |                         |                        |             |  |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|
| 28          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 175.968.000,00          | 176.061.900,00          | 93.900,00              | APBD        |  |
| <b>VIII</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>3.081.313.475,00</b> | <b>3.088.762.193,00</b> | <b>7.448.718,00</b>    | <b>APBD</b> |  |
| 29          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                            |                         | 4.655.000,00            | 4.655.000,00           | APBD        |  |
| 30          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | 43.173.508,00           | 46.727.616,00           | 3.554.108,00           | APBD        |  |
| 31          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 38.110.000,00           | 38.110.000,00           | -                      | APBD        |  |
| 32          | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 3.000.029.967,00        | 3.000.029.967,00        | -                      | APBD        |  |
|             |  |                         |                         |                        |             |  |
| <b>B</b>    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | <b>156.833.700,00</b>   | <b>205.908.550,00</b>   | <b>49.074.850,00</b>   | <b>APBD</b> |  |
| <b>IX</b>   | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>116.833.800,00</b>   | <b>165.908.650,00</b>   | <b>49.074.850,00</b>   | <b>APBD</b> |  |
| 33          | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal   | 116.833.800,00          | 176.039.791,00          | 59.205.991,00          | APBD        |  |
| <b>X</b>    | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | <b>39.999.900,00</b>    | <b>29.862.000,00</b>    | <b>(10.137.900,00)</b> | <b>APBD</b> |  |
| 34          | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota   | 39.999.900,00           | 29.862.000,00           | (10.137.900,00)        | APBD        |  |
|             |  |                         |                         |                        |             |  |
| <b>C</b>    | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>235.119.750,00</b>   | <b>222.039.352,00</b>   | <b>(13.080.398,00)</b> | <b>APBD</b> |  |
| <b>XI</b>   | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>235.119.750,00</b>   | <b>222.039.352,00</b>   | <b>(13.080.398,00)</b> | <b>APBD</b> |  |
| 35          | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | 235.119.750,00          | 222.039.352,00          | (13.080.398,00)        | APBD        |  |
|             |  |                         |                         |                        |             |  |
| <b>D</b>    | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>133.731.000,00</b>   | <b>128.493.000,00</b>   | <b>(5.238.000,00)</b>  | <b>APBD</b> |  |
| <b>XII</b>  | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>133.731.000,00</b>   | <b>128.493.000,00</b>   | <b>(5.238.000,00)</b>  | <b>APBD</b> |  |

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DPMPTSP KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

|      |  |                          |                          |                       |             |  |
|------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 36   | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik   | 51.470.800,00            | 50.632.800,00            | (838.000,00)          | APBD        |  |
| 37   | Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | 8.389.500,00             | 8.389.500,00             | -                     | APBD        |  |
| 38   | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko   | 73.870.700,00            | 69.470.700,00            | (4.400.000,00)        | APBD        |  |
|      |  |                          |                          |                       |             |  |
| E    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>595.257.000,00</b>    | <b>595.257.000,00</b>    | <b>-</b>              | <b>APBD</b> |  |
| XIII | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>595.257.000,00</b>    | <b>595.257.000,00</b>    | <b>-</b>              | <b>APBD</b> |  |
| 39   | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   | 89.288.000,00            | 89.288.000,00            | -                     | APBD        |  |
| 40   | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   | 327.393.000,00           | 327.393.000,00           | -                     | APBD        |  |
| 41   | Pegawasan Penanaman Modal  | 178.576.000,00           | 178.576.000,00           | -                     | APBD        |  |
|      |  |                          |                          |                       |             |  |
| F    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>44.508.900,00</b>     | <b>44.508.900,00</b>     | <b>-</b>              | <b>APBD</b> |  |
| XIV  | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>44.508.900,00</b>     | <b>44.508.900,00</b>     | <b>-</b>              | <b>APBD</b> |  |
| 42   | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 44.508.900,00            | 44.508.900,00            | -                     | APBD        |  |
|      | <b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>   | <b>10.580.224.400,00</b> | <b>11.122.551.000,00</b> | <b>542.326.600,00</b> |             |  |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Mengalami Perubahan dari pagu murni sebesar *Rp. 10.580.224.400,00,- (Sepuluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)*, perubahan anggaran menjadi *Rp. 11.122.551.000,00,- (Sebelas Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)*.

**BAB IV  
P E N U T U P**

Perubahan Renja ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja untuk tahun 2024, sebagai tindak lanjut atas Perubahan RKPD Tahun 2024.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Perlu menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis.
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Perubahan Renja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indicator kinerja yang telah tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi renja. Besar harapan kami agar dokumen perubahan renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan ke depan.

Demikian Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pangkalan Bun, Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Ir. H. KAMALUDIN, M.Si  
NIP. 19650105 199403 1 010**

